



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026 Page 14-30

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Desa S-2 AEK Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu

Dinda Melda Febrini¹, R. Sally Marisa Sihombing^{2✉}

Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara

Email: sallymarisa@usu.ac.id^{2✉}

Abstrak

Program bantuan sosial yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) resmi diperkenalkan pada tahun 2005. Di Indonesia, pemerintah desa mengawasi BLT dan mendapatkan dana dari Dana Desa pemerintah federal. Bantuan tunai diberikan kepada keluarga berpenghasilan rendah atau kurang mampu melalui proses musyawarah desa yang unik, yang memverifikasi calon penerima manfaat dan melaporkannya ke tingkat kabupaten dan kecamatan. Studi ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan pencatatan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan Teori Efektivitas Campbell J.P. yang mencakup Keberhasilan Program, Keberhasilan Target, Kepuasan Program, Tingkat Input dan Output, dan Pencapaian Tujuan Keseluruhan digunakan untuk analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pencapaian tujuan program BLT di Desa S-2 Aek Nabara telah terlaksana dengan baik dan sesuai tujuan program. Peserta BLT menerima bantuan sesuai jumlah tanpa potongan, namun masih terdapat ketidaktepatan sasaran dan pada tahun 2025 terjadi pemangkasan 15%. Bantuan BLT cukup bermanfaat bagi masyarakat meskipun jumlahnya sedikit, namun ada penerima yang menyalagunakan bantuan untuk kesenangan pribadi, dan ketergantungan masyarakat terhadap BLT dapat menurunkan inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha produktif.

Kata Kunci : *Efektivitas, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kemiskinan.*

Abstract

A social assistance program called Direct Cash Assistance (BLT) was officially introduced in 2005. In Indonesia, village governments oversee BLT and receive funding from the federal government's Village Fund. Cash assistance is provided to low-income or disadvantaged families through a unique village deliberation process, which verifies potential beneficiaries and reports them to the district and sub-district levels. This study collected data through observation, interviews, and record-keeping using descriptive qualitative methods. The Campbell J.P. Effectiveness Theory approach, which includes Program Success, Target Success, Program Satisfaction, Input and Output Levels, and Overall Goal Achievement, was used for analysis. The results show that the stages of achieving the BLT program's objectives in S-2 Aek Nabara Village have been implemented well and in accordance with the program's objectives. BLT participants received the appropriate amount of assistance without deductions, but there are still inaccuracies in targeting, and in 2025 there will be a 15% reduction. BLT assistance is quite beneficial for the community despite the small amount. However, some recipients misuse the assistance for personal pleasure, and community dependence on BLT can reduce initiatives to improve their standard of living through productive businesses.

Keyword: *Effectiveness, Direct Cash Assistance (BLT) Program, Poverty.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah kompleks yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di daerah tertinggal. Primanto (2023) menyatakan bahwa kemiskinan yang makin meluas merupakan inti dari berbagai permasalahan pembangunan. Dampak kemiskinan tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi minimnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Menurut Global Finance (2024), Indonesia menempati posisi ke-90 dari 190 negara dalam kategori kemiskinan. Pemerintah harus menanggulangi masalah ini karena peningkatan penduduk miskin berdampak luas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Herdiana, 2022).

Kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia untuk diselesaikan. Berbagai program sudah diupayakan, namun masalah ini tetap berlangsung (Aryani & Rachmawati, 2019). Salah satu langkah strategis pemerintah adalah meluncurkan program bantuan sosial berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini menyasar keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Bantuan ini juga diharapkan memberikan stimulus ekonomi sekaligus

meringankan beban masyarakat terdampak. BLT menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dalam kondisi krisis ekonomi.

Bantuan Langsung Tunai (BLT), dari bahasa Inggris "Direct Cash Assistance," merupakan program tunai yang diberikan pemerintah dengan atau tanpa syarat kepada masyarakat tidak mampu. Besaran dan mekanisme penyaluran BLT sangat bervariasi menurut kebijakan tiap negara. Indonesia pertama kali melaksanakan BLT pada 2005, digagas oleh Jusuf Kalla setelah terpilih sebagai Wakil Presiden dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden pada 2004. BLT resmi diberlakukan melalui Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 dengan target keluarga miskin selama 2005-2006. Setelah pelaksanaan awal, BLT kembali diselenggarakan tahun 2008 sebagai respons kenaikan harga minyak dunia melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2008. Pada 2013, program berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan mekanisme serupa. Bantuan ini diberikan tanpa syarat kepada keluarga miskin guna membantu mereka memenuhi kebutuhan akibat kenaikan harga bahan pokok yang dipicu pengurangan subsidi BBM. BLT dan BLSM merupakan contoh kebijakan sosial penting yang diaplikasikan secara luas di berbagai negara.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 memicu pemerintah Indonesia menerapkan kembali BLT melalui program BLT Dana Desa (BLT-DD). Program ini fokus membantu masyarakat terdampak pandemi dan mengacu pada Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan Rp600.000 per bulan selama 12 bulan, dengan total Rp5.400.000 kepada masing-masing keluarga. Tujuan utama adalah meringankan beban ekonomi dan membantu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan.

BLT telah menjadi instrumen penting dalam kebijakan sosial untuk membantu masyarakat miskin menghadapi berbagai tekanan ekonomi, termasuk pandemi. Meski Indonesia masih menghadapi tingkat kemiskinan yang signifikan (posisi ke-90 dari 190 negara menurut Global Finance 2024), pemerintah terus berupaya melalui program-program bantuan. Herdiana (2022) menegaskan bahwa kemiskinan memiliki dampak luas pada kehidupan sosial, sehingga penanganannya harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Dimensi kemiskinan meliputi kekurangan nutrisi, akses terbatas terhadap air bersih, perumahan tidak layak, layanan kesehatan kurang memadai, dan rendahnya tingkat pendidikan. Faktor penyebab kemiskinan di pedesaan termasuk minimnya kepemilikan sumber daya produksi seperti lahan, modal, dan keterampilan. Hal

ini menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari secara berkelanjutan, sehingga kondisi kemiskinan tetap membekas dan sulit diatasi.

Ada dua cara utama untuk mengukur kemiskinan: absolut dan relatif. Ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan, mereka dianggap berada dalam kemiskinan absolut. Sementara itu, kemiskinan relatif diukur dengan membandingkan pendapatan seseorang dengan kelompok masyarakat lain dalam lingkungan yang sama. Kedua jenis kemiskinan ini menunjukkan berbagai tantangan berbeda dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran. Penurunan penerima bantuan BLT di Desa S-2 Aek Nabara terjadi sejak 2021, dengan penyempitan penerima hanya warga setempat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108 Tahun 2024. Pada 2022, tercatat 49 keluarga menerima BLT, namun terjadi tren fluktuasi jumlah penerima hingga tahun 2024. Tahun 2025 menandai penurunan drastis menjadi hanya 25 keluarga penerima karena pemangkasan anggaran oleh pemerintah, berdasarkan wawancara Sekretaris Desa 28 Februari 2025.

Desa S-2 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, menjadi fokus penelitian ini karena karakteristik unik dalam implementasi BLT. Meskipun program berjalan bertahun-tahun dan data penyaluran meningkat, kesenjangan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masih nyata. Pemangkasan anggaran lewat Peraturan Menteri Desa (Permendes) No. 2 Tahun 2024 menimbulkan pengurangan jumlah penerima BLT, yang berpengaruh langsung pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa. BLT tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di masa sulit tetapi juga memicu ketergantungan. Banyak warga mulai mengandalkan BLT sebagai sumber pendapatan utama sehingga menurunkan motivasi untuk bekerja produktif. Fenomena ini dapat menghambat pembangunan ekonomi desa jangka panjang, karena ketergantungan terhadap bantuan sosial cenderung mengurangi usaha produktif masyarakat.

Proses penyaluran BLT di Desa S-2 Aek Nabara menghadapi kendala, seperti ketidakakuratan data penerima dan mekanisme distribusi yang kurang tepat sasaran. Akibatnya, ada warga miskin yang terlewat dan sebagian yang kurang layak malah menerima bantuan. Ketidakmerataan ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas BLT dalam menekan kemiskinan di desa, serta perlunya optimalisasi program agar bantuan lebih tepat bagi yang benar-benar membutuhkan. Analisis mendalam terhadap implementasi BLT di Desa S-2 Aek Nabara penting untuk mengidentifikasi perbaikan mekanisme distribusi dan menentukan kriteria penerima. Hal ini demi memperkuat dampak positif BLT dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Optimalisasi pelaksanaan BLT diperlukan agar tujuan pengurangan kemiskinan dapat dicapai secara efektif dengan distribusi yang adil dan transparan.

Penelitian terdahulu berperan penting dalam memperkaya kajian dan mempertegas orisinalitas penelitian ini (Randi, 2018). Meskipun belum ada penelitian yang persis sama, beberapa studi terkait BLT menjadi referensi dalam upaya memahami efektivitas dan kendala implementasi bantuan sosial di daerah. Kajian ini akan mengintegrasikan temuan tersebut untuk memberikan perspektif komprehensif tentang program BLT di Desa S-2 Aek Nabara. Beberapa penelitian terdahulu mengungkap temuan terkait efektivitas BLT. Khoirun Nisak dan Abdul Latib (2024) menyatakan BLT Dana Desa kurang efektif karena penyaluran tidak tepat sasaran, keterlambatan pencairan, dan kurangnya transparansi yang menimbulkan kecurigaan. Penelitian lain oleh Puspa Riani Harahap (2023) menunjukkan BLT belum efektif sepenuhnya dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakat akibat kenaikan BBM, dengan bantuan yang relatif kecil dan bersifat sementara.

Penelitian Puspita Eka Putri (2023) menggambarkan implementasi BLT-DD di Desa Tondon Langi masih menghadapi masalah distribusi tidak merata, dengan beberapa keluarga mendapat bantuan ganda dan ada juga yang tidak menerima sama sekali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis model implementasi kebijakan publik. Temuan ini relevan sebagai perbandingan dalam kajian BLT di Desa S-2 Aek Nabara untuk memperkuat rekomendasi perbaikan distribusi dan efektivitas BLT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diterapkan di Desa S-2 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu. Menurut Bogdan dan Taylor (1992, dalam Elvera & Yesita, 2021), penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. Kirk dan Miller (1986) menyatakan bahwa penelitian ini bergantung pada pengamatan alami terhadap subjek di lingkungan mereka. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meneliti kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan data untuk membangun teori. Definisi lain dari David Williams (1995) dan Moleong (2008) menegaskan penelitian ini bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik melalui kata-kata dan deskripsi.

Lokasi penelitian dipilih di Desa S-2 Aek Nabara karena relevan untuk melihat efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam mengurangi kemiskinan. Teknik pengumpulan data primer meliputi wawancara langsung dengan informan dan observasi terhadap kondisi di lapangan sesuai panduan Sugiyono (2010). Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan literatur terkait serta studi dokumentasi berupa arsip dan dokumen di lokasi. Menurut Riduwan (2010), metode ini membantu memperoleh data yang lengkap dan terperinci untuk menjawab masalah penelitian secara komprehensif.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Bogdan & Biklen dalam Moleong, 2017). Reduksi meliputi pemilahan dan penyederhanaan data untuk fokus pada informasi relevan tentang efektivitas BLT. Penyajian dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan mendeskripsikan temuan. Kesimpulan diambil berdasarkan pola dan tema dari data wawancara dan dokumentasi. Validitas data dijaga menggunakan teknik triangulasi yang melibatkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Moleong, 2004; Nasution, 2003; Wijaya, 2018), guna memastikan kredibilitas dan konsistensi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep penting dalam ranah politik dan pemerintahan yang mencerminkan tindakan nyata pemerintah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan sering disamakan dengan keputusan, program, atau rancangan tindakan tertentu, namun kebijakan publik memiliki karakter sistematis dan melibatkan keputusan bersama. Anderson menegaskan bahwa kebijakan publik adalah arah tindakan yang ditetapkan oleh aktor atau lembaga dalam mengatasi masalah tertentu dengan nilai dan tujuan yang disepakati. Kebijakan publik bukanlah tindakan spontan, melainkan upaya sadar dan terencana dari lembaga pemerintah. Anderson juga menyatakan bahwa kebijakan berfokus pada tujuan dan pola tindakan, bukan keputusan individual semata. Birkland menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan respons terhadap masalah publik, dibuat atas nama masyarakat, dan berorientasi pada tujuan tertentu yang pada akhirnya ditetapkan dan diimplementasikan oleh pemerintah.

Kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye, adalah segala sesuatu yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pemerintah menjalankan fungsi mengatur, melindungi, dan mendistribusikan sumber daya melalui kebijakan. Frederich dan Heinz & Kenneth menekankan bahwa kebijakan publik mencerminkan keputusan konsisten yang dijalankan berulang untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik adalah tindakan terukur pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat. Bridgman dan Davis menegaskan bahwa kebijakan publik melibatkan pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan Cochran memandangnya sebagai rangkaian tindakan pemerintah yang melibatkan pembentukan hukum dan aturan. Secara etimologis, istilah kebijakan berasal dari kata *policy* yang berarti pengelolaan urusan publik. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan instrumen penting untuk mengatur dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keputusan yang strategis dan implementatif.

Efektivitas Kebijakan Publik

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Effendy menjelaskan bahwa efektivitas terjadi ketika hasil sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas mencerminkan sejauh mana hasil kebijakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Efektivitas tidak hanya mengukur keberhasilan hasil, tetapi juga kesesuaian antara proses, biaya, dan waktu. Menurut Purwanti, efektivitas menunjukkan sejauh mana pekerjaan menghasilkan keluaran sesuai harapan. Syam menambahkan bahwa efektivitas mencerminkan tingkat kesesuaian antara output yang diharapkan dengan yang dicapai. Makmur menilai efektivitas sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi berdasarkan minimnya kesalahan dan tingginya akurasi pelaksanaan program. Mahmudi menegaskan bahwa efektivitas adalah tingkat kesesuaian antara hasil dengan tujuan kebijakan.

Efektivitas juga berfokus pada hasil (outcome). Suatu kebijakan dianggap efektif apabila output yang dihasilkan sejalan dengan target yang ditetapkan. Menurut Drucker, efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk dicapai. Dengan kata lain, efektivitas menekankan pada kemampuan lembaga dalam menghasilkan hasil maksimal yang sesuai dengan kebutuhan publik, bukan hanya sekadar menjalankan aktivitas. Zahnd membedakan efektivitas dan efisiensi; efektivitas berfokus pada hasil, sedangkan efisiensi pada cara dan sumber daya yang digunakan. Campbell J.P.

menyebutkan lima indikator efektivitas, yaitu keberhasilan program, pencapaian sasaran, kepuasan masyarakat, keseimbangan input-output, dan pencapaian tujuan keseluruhan organisasi. Dengan demikian, efektivitas kebijakan publik diukur dari seberapa jauh kebijakan mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Inisiatif pemerintah yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberikan uang kepada masyarakat kurang mampu untuk meringankan beban keuangan mereka. BLT awalnya diperkenalkan pada tahun 2005 dan masih digunakan hingga saat ini dalam berbagai cara. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi keadaan ekonomi yang menantang, seperti dampak epidemi atau kenaikan harga bahan bakar. BLT diberikan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah berdasarkan standar yang telah ditentukan dan didanai oleh hibah pemerintah, seperti Dana Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 merupakan beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum BLT. Aturan-aturan ini menjamin bahwa BLT diterapkan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berkeadilan bagi masyarakat. Di masa krisis, seperti pandemi COVID-19, BLT juga merupakan komponen kebijakan stabilitas keuangan negara.

Kriteria penerima BLT meliputi keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian, tidak menerima bantuan sosial lain, memiliki anggota keluarga rentan sakit, atau perempuan kepala keluarga. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial berfungsi sebagai dasar pendataan penerima. Hal ini mencegah tumpang tindih penerima dan menjamin ketepatan sasaran bantuan. Pengumpulan, verifikasi, validasi, dan penyaluran data merupakan tahapan mekanisme BLT. Aparat desa bekerja sama dengan masyarakat dalam pendataan. Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memutuskan hasil verifikasi setelah divalidasi melalui musyawarah desa. Demi pengawasan masyarakat, penyaluran dilakukan secara transparan dan dipublikasikan.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial dan ekonomi yang bersifat global. Menurut Nurwati, kemiskinan adalah persoalan yang telah ada sepanjang sejarah manusia dan menjadi fokus utama pembangunan di seluruh dunia. Kemiskinan didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, termasuk kebutuhan non-pangan. Garis Kemiskinan Makanan (GKP) dan Garis Kemiskinan Non-pangan (GNP) digunakan untuk mengukur kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan juga dapat dipahami sebagai ketimpangan distribusi pendapatan dan terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta lapangan kerja. Kurniawan Suparlan menjelaskan bahwa kemiskinan mencerminkan tingkat kehidupan rendah yang berdampak pada moral, kesehatan, dan harga diri seseorang. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan psikologis.

Dampak kemiskinan sangat luas, mencakup bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan psikologis. Dalam aspek kesehatan, kemiskinan meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan harapan hidup. Dalam pendidikan, kemiskinan menyebabkan rendahnya akses belajar dan tingginya angka putus sekolah. Secara ekonomi, masyarakat miskin sulit mengakses modal dan peluang kerja. Secara sosial, mereka rentan terhadap eksploitasi dan kriminalitas, sementara secara psikologis, kemiskinan menimbulkan stres dan hilangnya motivasi hidup.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, studi ini menunjukkan efektivitas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa S-2 Aek Nabara. Inisiatif ini merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah membantu masyarakat miskin menjaga stabilitas keuangan mereka, terutama selama fase pemulihan pascapandemi. Temuan menunjukkan bahwa, sejak pengumpulan data, pelaksanaan BLT telah memenuhi kriteria prosedural, validasi, hingga penyaluran dana kepada masyarakat penerima manfaat. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan sosial yang bersifat inklusif dan transparan untuk memastikan bantuan tepat sasaran (Wawancara Peneliti, 24 Juni 2025).

Proses implementasi BLT di Desa S-2 Aek Nabara menunjukkan tingkat efektivitas yang baik berdasarkan indikator keberhasilan program menurut Champbell J.P dalam Al-Bantani (2022), meliputi input-output, pencapaian target, kepuasan masyarakat, implementasi yang berhasil, dan pencapaian tujuan secara keseluruhan. Keberhasilan program terlihat dari keterlibatan aktif pemerintah desa, kepala dusun, dan perangkat lainnya dalam mendata calon penerima serta melakukan verifikasi lapangan untuk

meminimalkan kesalahan distribusi bantuan. Partisipasi masyarakat juga cukup tinggi karena adanya keterbukaan informasi yang baik. Hal ini memperkuat efektivitas kebijakan publik dalam konteks pemerintahan desa. Penyaluran BLT di desa ini telah dilakukan secara tunai sesuai ketentuan Kementerian Desa PDTT. Setiap penerima manfaat menerima dana bantuan sesuai jumlah yang ditetapkan tanpa potongan sedikit pun. Pemerintah desa berupaya menyalurkan dana tersebut secara tepat waktu dan bertanggung jawab. Meski demikian, masih terdapat kendala teknis seperti keterlambatan distribusi akibat faktor administrasi dan verifikasi ulang data keluarga penerima manfaat. Namun, hambatan tersebut tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pelaksana program di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, sebagian besar penerima BLT merasa terbantu dengan adanya program ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan biaya kesehatan. Program ini dinilai mampu mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga miskin dan memberikan rasa aman terhadap ketidakpastian ekonomi. Kepuasan masyarakat juga meningkat karena transparansi dan keterbukaan pemerintah desa dalam mengumumkan data penerima secara publik melalui papan informasi desa serta forum musyawarah (Wawancara Peneliti, 26 Juni 2025). Dari sisi efektivitas sasaran, ditemukan bahwa sebagian besar penerima manfaat merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak ekonomi. Namun, masih terdapat kasus ketidaktepatan sasaran akibat kurangnya pembaruan data penerima dan adanya perbedaan persepsi dalam menentukan kriteria "keluarga miskin". Meski demikian, pemerintah desa telah berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan data agar program BLT dapat lebih tepat sasaran di periode berikutnya. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen dalam mengembangkan tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel (Wawancara Peneliti, 27 Juni 2025).

Dari hasil observasi, ditemukan bahwa manfaat BLT tidak hanya berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan efek ekonomi lokal. Sebagian penerima memanfaatkan dana untuk kegiatan produktif kecil seperti berdagang atau membeli bahan usaha. Hal ini menunjukkan potensi transformasi bantuan konsumtif menjadi stimulus ekonomi mikro yang berkelanjutan. Namun, masih ditemukan penerima yang menggunakan dana untuk kepentingan nonproduktif seperti hiburan atau konsumsi berlebihan, sehingga efektivitas jangka panjangnya belum sepenuhnya optimal. Evaluasi terhadap kepuasan program menunjukkan bahwa masyarakat umumnya menilai proses

penyaluran berjalan dengan transparan dan tanpa diskriminasi. Kepala desa dan perangkatnya menjalankan fungsi pelayanan publik secara profesional dengan mengutamakan prinsip keadilan sosial. Program ini juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, yang berperan sebagai pelaksana kebijakan langsung di tingkat lokal. Meskipun begitu, masyarakat berharap agar ke depan jumlah bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi inflasi dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat.

Aspek input dan output program juga menjadi indikator penting efektivitas. Input berupa dana BLT yang bersumber dari Dana Desa telah dikelola dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Pemerintah desa memastikan dana tidak disalahgunakan dan diterima utuh oleh masyarakat. Output-nya berupa peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan keuangan rumah tangga yang baik. Namun, masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal administrasi dan pelaporan agar sistem pertanggungjawaban lebih sistematis.

Pencapaian tujuan menyeluruh dari program BLT menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif sebagai instrumen sementara dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga miskin. Walaupun belum mampu mengentaskan kemiskinan secara struktural, BLT berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang melindungi kelompok rentan dari dampak krisis ekonomi. Program ini juga menjadi media pembelajaran bagi pemerintah desa untuk memperkuat sistem pendataan, transparansi fiskal, dan akuntabilitas publik dalam penggunaan dana desa (Champbell J.P dalam Al-Bantani, 2022).

Namun demikian, hasil penelitian juga mengindikasikan munculnya efek ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. Sebagian penerima enggan mencari sumber penghasilan alternatif karena terbiasa mendapatkan bantuan rutin. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap menurunnya kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa disarankan untuk mengombinasikan program BLT dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, pembinaan usaha mikro, dan penguatan koperasi desa agar dampak sosial-ekonomi dapat berkelanjutan.

Analisis efektivitas program BLT juga memperlihatkan peran penting kolaborasi antar pemangku kepentingan. Untuk menetapkan persyaratan dan mengonfirmasi penerima hibah, pemerintah desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pejabat dusun, dan tokoh masyarakat. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan menciptakan sistem pengawasan dan keseimbangan yang mencegah terjadinya

penyimpangan. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn (1975), yang menyatakan bahwa tingkat kerja sama antar lembaga pelaksana dan sinergi antar aktor berperan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan.

Dari perspektif transparansi publik, Desa S-2 Aek Nabara telah menerapkan prinsip good governance dengan membuka akses informasi kepada masyarakat. Data penerima BLT diumumkan melalui media informasi desa, serta laporan realisasi dana dipublikasikan secara berkala. Keterbukaan ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan. Ada ruang untuk partisipasi masyarakat dan pengawasan pelaksanaan program. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan partisipasi publik sebagaimana ditekankan oleh UNDP (1997).

Meski pelaksanaan program dinilai efektif, penelitian menemukan kendala administratif dalam tahap pelaporan. Beberapa aparat desa masih kurang memahami sistem pelaporan keuangan berbasis digital yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Kondisi ini menyoroti perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia perangkat desa melalui digitalisasi administrasi dan pelatihan pengelolaan keuangan publik untuk memaksimalkan efektivitas program.

Selain itu, pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dipengaruhi oleh dinamika sosial di lingkungan sekitar. Warga yang tidak terdaftar sebagai penerima terus merasa iri dan tidak puas. Kurangnya pengetahuan tentang standar yang digunakan untuk memilih penerima merupakan penyebab perselisihan sosial kecil ini. Untuk memastikan masyarakat mengetahui landasan tujuan kebijakan ini, pemerintah desa harus melakukan komunikasi yang lebih luas. Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Dari aspek keberlanjutan, penelitian menyoroti bahwa BLT sebaiknya tidak hanya difokuskan pada bantuan tunai, tetapi juga diarahkan pada program penguatan ekonomi produktif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan inklusif yang menekankan pemberdayaan masyarakat miskin melalui peningkatan kapasitas ekonomi. Pemerintah desa diharapkan dapat mengintegrasikan program BLT dengan kegiatan ekonomi kreatif seperti pelatihan usaha, pertanian produktif, dan pengembangan UMKM berbasis komunitas agar dampak sosial-ekonomi lebih luas dan berkelanjutan (Al-Bantani, 2022).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas BLT juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi lokal. Di wilayah pedesaan dengan tingkat literasi keuangan rendah, sebagian penerima bantuan belum mampu mengelola dana dengan bijak. Oleh karena itu, pendampingan dan edukasi keuangan sederhana perlu dilakukan bersamaan dengan penyaluran bantuan. Pendekatan edukatif ini akan membantu masyarakat memahami pentingnya pengelolaan dana rumah tangga secara efisien serta mendorong kemandirian finansial jangka panjang.

Kebijakan BLT Dana Desa juga memiliki kontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Pelaksanaan program mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal administrasi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. BLT menjadi instrumen pembelajaran bagi desa dalam mengelola keuangan secara profesional dan sesuai regulasi. Dampaknya, terjadi perbaikan dalam sistem pelaporan, mekanisme pengawasan, serta peningkatan integritas aparatur desa dalam mengelola sumber daya publik (Chambell J.P dalam Al-Bantani, 2022).

Hasil penelitian menegaskan bahwa implementasi BLT di Desa S-2 Aek Nabara berhasil menumbuhkan rasa solidaritas sosial antarwarga. Penerima dan nonpenerima menunjukkan tingkat kepedulian yang meningkat melalui kegiatan gotong royong dan partisipasi sosial. Bantuan yang diterima sebagian masyarakat juga digunakan untuk membantu tetangga yang lebih membutuhkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial dapat memperkuat nilai-nilai sosial seperti empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial jika dijalankan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.

Efektivitas pelaksanaan BLT Dana Desa di Desa S-2 Aek Nabara tergolong baik karena memenuhi lima indikator utama yaitu keberhasilan pelaksanaan, ketepatan sasaran, kepuasan masyarakat, kesesuaian input-output, dan pencapaian tujuan. Meski masih terdapat kendala administratif dan sosial, upaya perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah desa. Keberhasilan ini menjadi contoh praktik implementasi kebijakan publik yang dapat dijadikan acuan bagi desa lain dalam mengoptimalkan fungsi dana desa sebagai instrumen kesejahteraan sosial (Van Meter & Van Horn, 1975).

Oleh karena itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dapat dikatakan merupakan strategi yang efektif untuk membantu masyarakat kurang mampu dan mendorong tata kelola desa yang bertanggung jawab. Namun, program ini perlu dibarengi dengan inisiatif pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas para pemimpin desa agar lebih berkelanjutan. Strategi ini akan menjamin bahwa bantuan sosial tidak hanya bersifat

altruistik tetapi juga transformatif dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan (UNDP, 1997).

SIMPULAN

Menanggapi pandemi COVID-19, Desa S-2 Aek Nabara meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk menciptakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu guna meningkatkan kualitas hidup dan memutus mata rantai kemiskinan di desa. Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian program BLT telah berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal meskipun belum sepenuhnya mampu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh.

Penerima BLT di Desa S-2 Aek Nabara sampai saat ini selalu menerima bantuan secara penuh sesuai jumlah yang ditetapkan, tanpa potongan, dan mengikuti prosedur yang berlaku. Bantuan BLT telah memberikan manfaat signifikan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kasus penyalahgunaan bantuan oleh sebagian penerima yang menggunakannya untuk kepentingan pribadi, sehingga perlu mendapat perhatian serius. Program BLT di Desa S-2 Aek Nabara berjalan efektif dalam mencapai tujuan memberikan dukungan kepada keluarga miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Meski begitu, pengawasan lebih ketat dan upaya pencegahan penyalahgunaan sangat penting agar BLT dapat terus berfungsi optimal dan berkontribusi nyata dalam pengurangan kemiskinan di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Al-Bantani, Ma, Jumiati, Ie, & Wicaksono, As (2022). Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Intervensi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm)-Stunting Di Desa Bayumundu Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22 (3), 2184-2193.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Awalia, S., & Sumayya, S. A. (2024). Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Pedesaan. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 11(2), 156-175.

- Banerjee, A., Hanna, R., Olken, Ba, & Sumarto, S. (2020). (Kurang)nya Efek Distorsi Dari Uji Proksi-Rata-Rata: Hasil Dari Eksperimen Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Publik Plus*, 1, 100001.
- Bawadi, Z., & Ratnasari, P. (2023). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 9(1), 71-82.
- Bungin, B., & Moleong, L. J. A. (2007). Jenis Dan Pendekatan Penelitian. *Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di Pt. Pelindo*, 1.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83-88.
- Elvera, S. E., & Yesita Astarina, S. E. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi.
- Fauzi, A. Baiatun Nisa, Darmawan Napitupulu, Fitri Abdillah, AA Gde Satia Utama, Candra Zonyfar, Rini Nuraini, Dini Silvi Purnia, Irma Setyawati, Tiolina Evi, Silvester Dian Handy Permana, And Maria Susila Sumartiningsih. *Metode Penelitian*.
- Firmansyah, W. I., & Fanida, E. H. (2022). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kepatih Kabupaten Jombang. *Publika*, 261-272.
- Gaspersz, P. C., Sialana, F., & Tuharea, J. (2024). Upaya Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Negeri Nakupia Kecamatan Tns Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi*, 1(2), 176-185.
- Hadi, N., Anjasmari, N. M. M., & Noorrahman, M. F. (2025). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Sungai Kuini Dan Banyu Tajun Hilir). *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 90-102.
- Harmawan, B. N., Munawaroh, R., Oktaviani, A., & Purwati, R. (2023). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan. Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 33-42.
- Herdiana, D. (2022). Kemiskinan, Kesenjangan Sosial Dan Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 2(3), 172-180.
- Kawung, A. M., Lumolos, J., & Sampe, S. (2020). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Mahakeret Barat Dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(4).

- Mulyani, H. T. S. (2022). Efektivitas Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Dan Bansos APBD Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Kampung Jeruk. *Indonesian Journal Of Accounting And Business*, 4(1), 50-60.
- Mutmainah, F., Husaini, M., & Sugiannor, S. (2024). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah Dan Desa Lajar). *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(1), 11-19.
- Primanto, A., & Sos, S. Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia. Zahira Media Publisher (2023:1-2).
- Putra, R. T., Wibowo, S. A., & Pranoto, Y. A. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Blt Di Kecamatan Sampang Menggunakan Metode Saw Dan Metode Ahp Berbasis Web. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 5(1), 321-327.
- Raharjo, P. (2014). Konsep Efektivitas. Yogyakarta : Konsep Efektivitas. Rusfiana, Y. (2021). Memahami Birokrasi . Bandung : Alfabeta.
- Rahayuni, N. W. I. S. (2022). *Pengaruh Motivasi Kerja Dan Efektivitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Telkom Akses Di Plaza Teuku Umar Denpasar* (Doctoral Dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Rahayuni, W., & Rusli, Z. (2021). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 17-27.
- Rahman, K. (2024). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Oleh Pemerintah Desa Candi Rejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 349-357.
- Ramadhona, M., & Sahuri, C. (2017). *Efektivitas Disiplin Pegawai Di Sekertariat Daerah Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif. *No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Rosfadhila, M., Toyamah, N., Sulaksono, B., Devina, S., Sodo, R. J., & Syukri, M. (2011). Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) 2008 Dan Evaluasi Penerima Program Blt 2005 Di Indonesia. Smeru Research Institute, 1-107.
- Sahid, M., Husaini, M., & Baihaqi, A. (2025). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Sungai Dalam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pelayanan Publik*, 2(1), 80-89.

- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Sugiyono, P. D. (2010). Metode Peneliiian. *Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Suryono, A. (2021). *Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Pada Kecamatan Coblong Kota Bandung* (Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Syhroni, M. I. (2022). Prosedur Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Al-Musthafa Stit Al-Aziziyah Lombok Barat*, 2(3), 43-56.
- Trisnawati, Y., & Nuryanah, S. (2022). Evaluating The Effectiveness Of Tax Objection Review In Indonesia's Tax Authority. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 4.
- Wajdi, F. (2022). *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Media Pressindo.
- Yusuf, A. M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Prenada Media.